

## Hubungan Peran Pemimpin Formal Dengan Partisipasi Masyarakat

(Kasus Pembangunan Jalan Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang)

### *The Correlation Between The Role Of The Formal Leader And Community Participation (Case Of Road Development In Ngroto Village, Pujon District, Malang Regency)*

Uhad Afras Ilzamil Haq, dan Zessy Ardinal Barlan

Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia,  
Institut Pertanian Bogor, Dramaga Bogor 16680, Indonesia  
E-mail: [uhad.haq@gmail.com](mailto:uhad.haq@gmail.com); [Zessy\\_ab@yahoo.com](mailto:Zessy_ab@yahoo.com)

#### **ABSTRACT**

*The village head as a formal leader has an important role in infrastructure development. Not only that, the village head also has the authority to provide services, increase the role and empower the community. All of this is aimed at improving people's welfare. Furthermore, the level of participation is the degree of community involvement in a program seen from the opportunity of the community to be involved and influence the program's running. In this connection, it is necessary to align the role of the village head with community participation in order to create benefits from infrastructure development. The purpose of this study was to analyze the role of formal leadership. Then analyze the level of community participation in road construction, and also analyze the relationship between the role of formal leaders and community participation in development. Furthermore, the research method used is a quantitative method with a survey approach. The data were analyzed using frequency tables and cross tabulations, then the Spearman Rank correlation test was performed to determine the relationship between variables.*

*Keywords: Infrastructure, Participation, Role of Leaders*

#### **ABSTRAK**

Kepala desa sebagai pemimpin formal memiliki peran penting dalam pembangunan infrastruktur. Tidak itu saja, kepala desa juga memiliki kewenangan untuk memberi pelayanan, meningkatkan peran dan pemberdayaan masyarakat. Semua ini tidak lain bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya tingkatan partisipasi merupakan derajat tingkat keterlibatan masyarakat dalam sebuah program. Sehubungan dengan itu, diperlukan keselarasan antara peran kepala desa dengan partisipasi masyarakat agar terciptanya manfaat pembangunan infrastruktur. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran kepemimpinan formal. Kemudian menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan jalan, dan juga menganalisis hubungan antara peran pemimpin formal dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Data dianalisis dengan menggunakan tabel frekuensi dan tabulasi silang, lalu dilakukan uji korelasi Rank Spearman untuk mengetahui hubungan antar variabel.

Kata Kunci: Infrastruktur, Partisipasi, Peran Pemimpin

#### **PENDAHULUAN**

Pelayanan publik merupakan serangkaian bentuk pelaksanaan kepentingan umum yang bergerak di bidang jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik (Sianipar 1998). Secara teoritis sedikitnya ada tiga fungsi pelayanan yang harus dijalankan oleh pemerintah tanpa memandang tingkatannya, yaitu fungsi pelayanan masyarakat (public service function), fungsi pembangunan (development function) dan fungsi perlindungan (protection function). Dalam hal ini fungsi pembangunan mencakup infrastruktur (Widodo 2011). Infrastruktur

merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan dipandang sebagai lokomotif pembangunan nasional maupun daerah (Gie 2002). Berdasarkan data BPS (2015), pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 4,73 persen masih jauh dari harapan, terutama karena Indonesia membutuhkan pertumbuhan minimal 7 persen agar dapat menjadi negara maju. Lemahnya faktor infrastruktur juga dikonfirmasi oleh hasil survei international Institute for Management Development (IMD). Hasil surveinya pada tahun 2011 menempatkan

Indonesia pada peringkat 37 dari 59 negara dengan titik lemah tingkat daya saing Indonesia terletak pada infrastruktur dasar. Peningkatan ekonomi harus dimulai dari pembangunan infrastruktur. Pemaparan tersebut diperkuat dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2009) yang menyatakan bahwa infrastruktur berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi (secara makro dan mikro) serta perkembangan suatu negara atau wilayah. Begitu banyak dan besarnya peran infrastruktur sehingga dalam sebuah studi yang dilakukan di Amerika Serikat, Aschauer (1989) menunjukkan bahwa tingkat pengembalian investasi infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi, adalah sebesar 60% (Dikun 2003). Pemerintah Indonesia pun telah melakukan berbagai macam upaya dalam rangka mendorong investasi untuk beragam sektor terkait infrastruktur. Hasilnya terbukti dalam data BPS 2014 hingga 2018, bahwa desa tertinggal berkurang sebesar 6.518. Artinya, berbagai pembangunan yang dilakukan di desa mampu mengurangi angka desa tertinggal. Kepala desa memiliki peran penting dalam pembangunan infrastruktur. Hal ini berhubungan dengan pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menjelaskan bahwa prinsip otonomi yang seluas-luasnya, dalam arti kepala desa diberikan kewenangan mengurus dan mengatur urusan pemerintahan. Sehingga kepala desa memiliki kewenangan untuk memberi pelayanan, meningkatkan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan pembangunan tidak lepas dari adanya partisipasi masyarakatnya, dalam hal ini untuk mencapai target pembangunan perlu ditunjukkan oleh kebijaksanaan pemerintah (Akbar, MF, Suprpto, Surati, 2018). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai (Olly Ersy Laoh, dkk, 2015). Tingkat partisipasi menurut Arnstein 2 (1969) terdiri dari delapan tangga yang dapat dikelompokkan menjadi tiga derajat yakni non participation, tokenism, dan citizen power.

Desa Ngroto Kecamatan Pujon Kabupaten Malang merupakan salah satu desa di wilayah Kabupaten Malang yang berada di wilayah Malang Barat. Memiliki luas wilayah sekitar 328,384 hektare (ha) yang berada di jalur wisata antara Kota Batu dan juga Kabupaten Kediri. Hadirnya Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah memberi banyak perubahan Desa Ngroto, baik dalam kewenangannya untuk mengelola desa serta peningkatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Pembangunan desa berdampak pada kegiatan ekonomi masyarakat dan semakin berkembangnya segala akses masyarakat baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya. Tahun 2018 kemarin Desa Ngroto mendapatkan penghargaan sebagai desa terbaik mandiri nasional sekaligus menduduki peringkat pertama di antara 100 desa menurut Indeks Desa Membangun (IDM) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Tahun 2014, Ngroto hanya berstatus desa berkembang dengan nilai IDM 64. Hanya butuh sekitar 4 tahun, Ngroto menjelma menjadi desa mandiri dengan nilai IDM 94. Tentunya capaian ini tidak lepas dari komitmen Pemerintah Kabupaten Malang dalam melakukan intervensi positif untuk mengembangkan Desa Ngroto, dan partisipasi masyarakat yang mendukung kemajuan desa. Oleh karena itu, dapat dirumuskan masalah penelitian, diantaranya adalah (1) bagaimana peran pemimpin formal Desa Ngroto dalam pembangunan jalan? (2) bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan jalan? (3) bagaimana hubungan peran pemimpin formal dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan jalan?

## **PENDEKATAN TEORITIS**

### **Konsep kepemimpinan dan pemimpin**

Kartono (2008) berpendapat bahwa kepemimpinan merupakan relasi dan pengaruh antara pemimpin dengan yang dipimpin. Kepemimpinan tersebut muncul dan berkembang sebagai hasil dari interaksi otomatis antara pemimpin dengan orang-orang yang dipimpinnya. Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan

kemampuan seseorang untuk memengaruhi dan mengarahkan orang secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan. Sebagaimana diungkapkan Sedarmayanti (2009) bahwa kepemimpinan (leadership) meliputi: (1) Proses dalam memengaruhi orang lain agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang diinginkan seorang pemimpin; (2) Hubungan interaksi antar pengikut dengan pimpinan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan; (3) Proses memengaruhi aktivitas/perilaku kelompok yang diorganisasikan ke arah pencapaian tujuan; (4) Proses memberi arti (pengarahan berarti) terhadap usaha kolektif dan menyebabkan adanya kesediaan untuk melakukan aktivitas/perilaku yang diinginkan untuk pencapaian sasaran; (5) Proses memengaruhi kegiatan individu/kelompok dalam usaha mencapai tujuan pada situasi tertentu. Menurut Kartono (2008), pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan dan kelebihan di satu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan. Sebagaimana diungkapkan Sedarmayanti (2009) bahwa pemimpin (leader) adalah: (1) Seseorang yang mampu memengaruhi orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai yang diinginkan; (2) Seseorang yang menjalankan kepemimpinan sedangkan pimpinan (manager) adalah seseorang yang menjalankan manajemen. Orang yang sama harus menjalankan dua hal secara efektif: manajemen dan kepemimpinan; (3) Orang yang melakukan atau menjalankan kepemimpinan; (4) Kata “pemimpin” mencerminkan kedudukan seseorang atau kelompok orang pada hierarki tertentu dalam organisasi, yang mempunyai bawahan, karena kedudukan yang bersangkutan mendapatkan atau mempunyai kekuasaan formal, dan tanggung jawab.

### **Pemimpin Formal dan Informal**

Peran kepala desa sebagai pemimpin formal menurut Tjokroamidjojo dalam Mahayana (2013) yaitu sebagai berikut: (1) Motivator yaitu fungsi pemerintah desa sebagai pendorong dan pemberi semangat kepada masyarakat setempat, agar ikut melakukan tindakan yang positif sehingga apa yang diharapkan dapat lebih berkembang dan

suatu saat dapat menjadi penopang perekonomian yang ada. (2) Fasilitator dalam hal ini kepala desa sebagai fasilitator yaitu orang yang memberikan bantuan dan menjadi narasumber yang baik untuk berbagai permasalahan serta memfasilitasi berbagai kegiatan pembangunan desa memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pembangunan sehingga program pembangunan desa dapat berjalan dengan baik. (3) Mobilisator yaitu orang yang mengomunikasikan atau mengarahkan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sebuah pembangunan guna untuk kepentingan bersama. Fokus pemimpin informal adalah orang yang memimpin kelompok informal yang statusnya tidak resmi, pada umumnya tidak didukung oleh peraturan-pertaturan yang tertulis seperti pada kelompok formal. Salah satu peran pemimpin lokal formal (kepala desa) menurut Lestari (1991) yaitu: (1) sebagai komunikator, yakni peran pemimpin yang berfungsi untuk menerjemahkan perintah dan segala kebijakan dari pemerintahan di atasnya; (2) sebagai motivator, yakni peran pemimpin yang senantiasa berusaha menyadarkan dan menggerakkan masyarakat ke arah yang lebih baik; (3) sebagai koordinator, yaitu peran pemimpin yang berfungsi untuk mengkoordinasi perencanaan dari instansi “atas desa” kemudian melaksanakannya; (4) sebagai pemersatu, yakni pemimpin berfungsi mempersatukan segala potensi yang ada di desa, berupa budaya, dana, dan segala unsur dari pemimpin kelompok (key people) digerakkan serta diarahkan; (5) sebagai pemimpin tertinggi, yakni dalam desa, berkewajiban melindungi dan memberikan contoh (teladan) kepada rakyat.

### **Tingkat Partisipasi**

Tingkatan partisipasi merupakan derajat tingkat keterlibatan masyarakat dalam sebuah program terlihat dari kesempatan masyarakat untuk terlibat dan memengaruhi jalannya program. Merujuk pada makalah yang berjudul “A Ladder of Citizen Participation” dalam Journal of The American Planning Association (1969), Arnstein mengemukakan delapan tangga atau tingkatan partisipasi yang menunjukkan tingkat keterlibatan masyarakat dalam sebuah program, yaitu: 1. Manipulasi (manipulation), berupa

tingkatan ketika masyarakat yang ditempatkan di dewan penasehat untuk tujuan “mendidik”

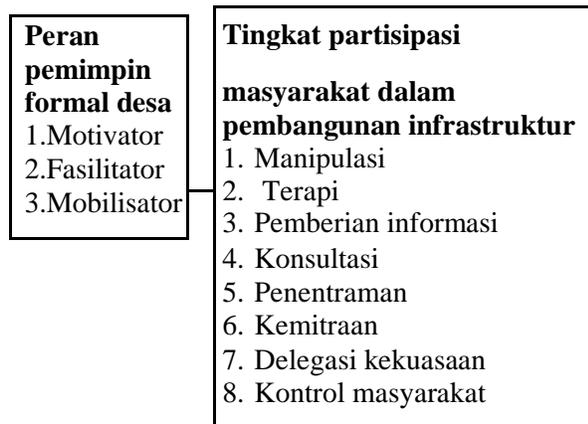
mereka atau merekayasa dukungan mereka. Masyarakat tidak berpartisipasi asli dan partisipasi terendah, mereka hanya dijadikan alat bagi pemegang kekuasaan. 2. Terapi (therapy), berupa tingkatan ketika topeng yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan. Bentuk partisipasi ini yaitu masyarakat terlibat secara luas namun hanya sekadar “menyembuhkan” dari patologi sosial yang ada, bukan mengubah keadaannya. 3. Pemberian informasi (informing), berupa tingkatan ketika komunikasi satu arah dalam memberikan informasi mengenai program tanpa adanya ruang untuk memberikan feedback dan kekuasaan untuk negosiasi bagi masyarakat. 4. Konsultasi (consultation), berupa tingkatan ketika masyarakat diberikan ruang untuk berpendapat, namun tidak ada jaminan pendapat mereka akan dipertimbangkan. 5. Penentruman (placation), berupa tingkatan ketika masyarakat sudah memiliki pengaruh dalam perencanaan kegiatan walaupun tokenisme masih ada. Apabila kekuasaan elit lokal mulai mendominasi, maka pemegang kekuasaan akan kembali mengendalikan. 6. Kemitraan (partnership), berupa tingkatan ketika kekuasaan sudah didistribusikan atas negosiasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan. Perencanaan dan pengambilan keputusan sudah terdapat pembagian antara keduanya dengan aturan-aturan tertentu yang tidak dapat diubah secara sepihak. 7. Delegasi kekuasaan (delegated power), berupa tingkatan ketika negosiasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan di mana masyarakat mendominasi otoritas dalam perencanaan dan pengambilan keputusan program. 8. Kontrol masyarakat (citizen control), berupa tingkatan ketika masyarakat sudah memegang penuh kontrol atas suatu program, mulai dari mengatur kebijakan sampai aspek manajerial program tanpa campur tangan pihak luar.

### **Kerangka Pemikiran**

Peran kepala desa menurut Tjokroamidjojo dalam Mahayana (2013) yaitu sebagai berikut: (1) Motivator yaitu fungsi pemerintah desa

sebagai pendorong dan pemberi semangat kepada masyarakat setempat, agar ikut melakukan tindakan yang positif sehingga apa yang diharapkan dapat lebih berkembang dan suatu saat dapat menjadi penopang perekonomian yang ada; (2) Fasilitator, dalam hal ini kepala desa sebagai fasilitator yaitu orang yang memberikan bantuan dan menjadi narasumber yang baik untuk berbagai permasalahan serta memfasilitasi berbagai kegiatan pembangunan desa memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pembangunan sehingga program pembangunan desa dapat berjalan dengan baik; (3) Mobilisator, Peran pemimpin sebagai komunikator atau pengarah untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan di suatu desa agar diterima dan terorganisir dengan baik oleh masyarakat. Keberhasilan suatu program tidak terlepas dari adanya partisipasi masyarakatnya. Partisipasi dalam pengembangan komunitas harus menciptakan peran serta yang maksimal dengan tujuan agar semua orang dalam masyarakat tersebut dapat terlibat secara aktif pada proses dan kegiatan program (Nasdian 2014). Untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat peneliti menggunakan teori Arnstein. Teori Arnstein membagi tingkat partisipasi menjadi delapan tingkat dan delapan tingkat tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga derajat partisipasi yaitu : (1) Manipulasi, (2) Terapi, (3) Pemberian informasi, (4) Konsultasi, (5) Penentruman, (6) Kemitraan, (7) Delegasi kekuasaan, (8) Kontrol masyarakat. Teori Arnstein dipilih karena dapat membuktikan kekuatan partisipasi masyarakat dengan berbagai tingkatannya dan dalam teori Arnstein tersebut dapat membedakan secara jelas di antara tingkatannya. Merujuk pada analisis referensi di atas, terdapat persepsi masyarakat terhadap peran kepala desa yang berhubungan dengan tingkat partisipasi masyarakat. Persepsi adalah proses penilaian seseorang atau sekelompok orang terhadap objek, peristiwa, atau stimulus dengan

melibatkan pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan objek tersebut, melalui proses kognisi dan afeksi untuk membentuk objek tersebut (Halim, 2005). Selanjutnya, berdasarkan penelitian Diana (2008) peran kepemimpinan menjadi efektif dalam pencapaian tujuan dengan memberikan bimbingan dan pengarahan, memengaruhi perasaan dan perilaku orang lain, serta menggerakkan orang lain untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Berdasarkan pemaparan di atas kemungkinan peran kepemimpinan kepala desa sebagai formal di tingkat desa berhubungan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam studi kasus pembangunan jalan di Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang



Gambar 1 Kerangka pemikiran hubungan kepemimpinan kepala desa dengan partisipasi masyarakat

Keterangan  
 — : Hubungan

**Hipotesis Penelitian**

1. Diduga terdapat hubungan nyata antara faktor lingkungan (ketersediaan media dan pengaruh orang lain) dengan literasi media (kemampuan menggunakan, pemahaman kritis, dan kemampuan komunikatif).

**PENDEKATAN LAPANGAN**

**Metode Penelitian**

Penelitian mengenai hubungan peran pemimpin formal dengan partisipasi masyarakat ini menggunakan metode kuantitatif yang didukung

dengan data kualitatif. Metode kuantitatif dilakukan dengan pendekatan survei menggunakan kuesioner sebagai instrumen dalam mengumpulkan data yang diisi oleh responden (Singarimbun et al 2012). Sementara itu, data kualitatif yang mendukung data kuantitatif merupakan data hasil wawancara mendalam berdasarkan panduan pertanyaan wawancara dengan informan, observasi lapang dan penelusuran dokumen yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur jalan Desa Ngroto.

**Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan sengaja (purposive) dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: 1. Tahun 2014 Ngroto hanya berstatus desa berkembang dan memiliki infrastruktur yang sangat rendah (Data BPS Kemendes PDTT 2014). 2. Tahun 2018 Desa Ngroto mendapatkan penghargaan sebagai desa terbaik mandiri nasional sekaligus menduduki peringkat pertama di antara 100 desa menurut indeks desa membangun (IDM) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Data BPS Kemendes PDTT 2018). Pelaksanaan kegiatan penelitian dimulai dari bulan Februari 2020 sampai dengan Juli 2020 yang meliputi penyusunan proposal skripsi, uji kelayakan, kolokium, perbaikan proposal, survei lokasi, uji validitas dan reliabilitas, pengambilan data lapang, pengolahan dan analisis data, penulisan draft laporan skripsi, uji petik, sidang skripsi, dan perbaikan skripsi.

**Teknik Penentuan Responden dan Informan**

Jumlah penduduk Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang yang berjumlah 6.264 orang (BPS 2018). Populasi dari penelitian ini adalah perwakilan masyarakat Desa Ngroto berasal dari masing-masing dusun yang dipercayai oleh Kepala Dusun yaitu sebanyak 68 orang. Pemilihan perwakilan 68 orang tersebut melalui musyawarah dusun dan termasuk orang yang dipercayai untuk mewakili dusunnya masing-masing. Pembentukan 68 orang tersebut dinamai panitia dusun yang dibentuk oleh bapak kepala desa sejak periode pertama dengan bertujuan lebih mengefektifkan proses komunikasi antara pihak desa dengan seluruh masyarakat tiap dusunnya. Pada awal pembentukan terdapat 70 orang, dikarenakan

kesehatan maka 2 orang tersebut memundurkan diri dan saat ini tersisa 68 orang yang terdiri dari 25 orang Dusun Maron, 25 orang Dusun Lebaksari dan 18 orang Dusun Krajan. Jumlah banyaknya perwakilan ditentukan oleh luas wilayah, padat penduduk dan kebutuhan pembangunan. Subjek dalam penelitian ini adalah responden dan informan. Responden adalah orang yang memberikan informasi mengenai diri mereka sendiri sebagai sumber data. Informan adalah orang yang memberikan informasi ataupun keterangan tambahan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Responden yang diteliti merupakan perwakilan dusun (panitia dusun) yang juga termasuk masyarakat Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Pemilihan responden dengan simple random sampling, yakni sebuah sampel yang diambil sedemikian rupa sehingga tiap unit penelitian mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel (Singarimbun 2012). Unit analisis yang digunakan oleh peneliti merupakan lingkup individu dengan jumlah sampel yang dipilih secara acak adalah 40 responden dari total 68 populasi yang ada di lokasi penelitian dan tersebar disemua dusun (Dusun Maron, Dusun Lebaksari dan Dusun Krajan). Menurut Singarimbun et al. (2012), syarat uji statistik parametrik yaitu minimal jumlah sampel lebih dari 30 responden, sehingga jumlah sampel 40 responden memenuhi syarat tersebut. Untuk respondennya sendiri terdiri dari beberapa tokoh masyarakat dan *stakeholder* terkait pembangunan infrastruktur Desa.

### Jenis Data dan Pengumpulan Data

Terdapat dua subjek dalam penelitian ini, yaitu informan dan responden. Data kualitatif diperoleh dari wawancara mendalam yang dilakukan kepada informan, sedangkan data kuantitatif diperoleh dari kuesioner yang dilakukan kepada responden. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah individu. Penentuan jumlah sampel dari seluruh populasi menggunakan rumus Slovin seperti berikut. melihat data responden berdasarkan masing-masing variabel secara tunggal. Aplikasi SPSS 21.0 digunakan untuk membantu dalam uji statistik yaitu uji korelasi Rank Spearman. Uji korelasi Rank Spearman digunakan untuk

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n : jumlah sampel

N : jumlah populasi

e : batas toleransi kesalahan (error tolerance)

dan nilai e sebesar 10 persen

Penentuan jumlah sampel tersebut dapat menggunakan batas toleransi kesalahan sebesar 10 hingga 20 persen dari jumlah populasi penelitian. Namun, karena keterbatasan waktu dan biaya dalam melakukan penelitian, digunakan batas toleransi kesalahan sebesar 10 persen dari jumlah populasi. Hal itu berarti sampel yang digunakan sebanyak 40 orang responden yang merupakan perwakilan dari 3 dusun yang berbeda akan diberikan kuesioner secara langsung. Terdapat 3 dusun yaitu : Dusun Lebaksari, Dusun Krajan dan Dusun Maron. Perwakilan terbanyak berasal dari Dusun Lebaksari dan Dusun Maron, dikarenakan pihak Desa Ngroto mengfokuskan pembangunan di dua dusun tersebut. Sementara itu, pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling (sengaja) atau dengan pertimbangan tertentu. Orang-orang

### Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini mempunyai dua jenis data, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Pengolahan dan analisis data kuantitatif menggunakan aplikasi Microsoft Excell 2013 dan SPSS 21.0. Aplikasi Microsoft Excell 2013 digunakan untuk membuat tabel frekuensi. Tabel frekuensi berfungsi untuk dua variabel yang berskala minimal ordinal dan tidak menentukan prasyarat data terdistribusi normal. Uji korelasi Rank Spearman dilakukan untuk melihat korelasi antara variabel independen dalam peran pemimpin dan pembangunan infrastruktur Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Data kualitatif dianalisis menggunakan hasil rangkuman wawancara mendalam dengan para responden dan informan. Kemudian dilakukan proses pemilihan dan penyederhanaan data hasil wawancara mendalam, lalu menyusun informasi dan data yang diperoleh menjadi serangkaian kata-kata atau narasi yang mudah dibaca kedalam sebuah laporan. Dilakukan verifikasi, penarikan kesimpulan dari hasil yang telah diolah untuk mendukung data kuantitatif

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peran Motivator

Motivator adalah seseorang yang memiliki kemampuan sebagai pendorong atau memotivasi orang lain. Peran kepala desa sebagai motivator artinya kemampuan yang dimiliki pemimpin sebagai pendorong masyarakatnya untuk mengikuti setiap aturan dan kegiatan yang ada di Desa Ngroto.

Berdasarkan hasil tabel 1 bahwa sebanyak 54 persen mempersepsikan peran pemimpin kepala desa sebagai motivator tergolong kategori sedang, selanjutnya 23 persen mempersepsikan rendah dan tinggi.

Tabel 1 persepsi tentang Peran Motivator dalam Kepemimpinan Kepala Desa Ngroto

Tingkat Peran Pemimpin	Jumlah (n)	Persentase (%)
Rendah	9	23
Sedang	22	54
Tinggi	9	23
Total	40	100

Hasil data menunjukkan bahwa kepala Desa Ngroto dinilai “cukup/sesuai” berperan dalam memotivasi masyarakatnya untuk hadir pada setiap kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan desa. Hal tersebut didukung oleh latar belakang bapak Prayogi sebagai orang Jawa-Madura yang membuat masyarakat merasa tidak enak jika tidak menghadiri rapat tersebut. Ditambah bapak Prayogi ini memiliki hubungan erat dengan salah satu pendiri desa (leluhur desa). Hal tersebut juga didukung pertanyaan kuesioner dengan mayoritas jawaban sedang, yaitu “Pemimpin mampu menghadirkan masyarakat untuk terjun langsung pada kegiatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur karena latar belakangnya bapak” Kategori rendah diisi oleh responden yang sama sekali tidak mengikuti dan ada yang beberapa kecewa dengan program pembangunan infrastruktur Desa Ngroto di periode kedua bapak Prayogi sebagai kepala desa.

### Peran Fasilitator

Peran lain seorang pemimpin formal adalah peranannya sebagai fasilitator. Peran pemimpin sebagai fasilitator adalah peran pemimpin kepala desa sebagai wadah fasilitas jika ada keinginan ataupun permasalahan masyarakat, terutama

mengenai pembangunan infrastruktur Desa Ngroto yang terbagi menjadi 3 dusun dan memiliki keinginan yang berbeda tiap-tiap dusun. Berdasarkan Tabel 2 memperlihatkan masih didominasi oleh kategori sedang sebanyak 23 orang responden atau 58 persen mempersepsikan peran pemimpin kepala desa sebagai fasilitator dinilai cukup dan masih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, selanjutnya 19 persen mempersepsikan rendah dan 23 persen mempersepsikan tinggi.

Tabel 2 Persepsi tentang Peran Fasilitator dalam Kepemimpinan Kepala Desa Ngroto

Tingkat Peran Pemimpin	Jumlah (n)	Persentase (%)
Rendah	8	19
Sedang	23	58
Tinggi	9	23
Total	40	100

Kategori sedang peran pemimpin pada tingkat fasilitator dikarenakan bapak Prayogi selaku kepala Desa Ngroto dinilai cukup sering untuk turun langsung dalam kerja bakti pembangunan infrastruktur jalan dan mengontrol langsung proses pembangunan. Hal tersebut juga didukung oleh pertanyaan kuesioner dengan mayoritas jawaban sedang, yaitu “Pemimpin mampu memberikan fasilitas non materi berupa tenaga (turun langsung) untuk pembangunan infrastruktur”. Kategori tinggi disebutkan oleh orang-orang yang sangat dekat dengan bapak Prayogi, karena tidak banyak yang tahu jika bapak Prayogi sering menggunakan uang pribadinya untuk proses pembangunan jalan, contohnya untuk uang konsumsi ataupun akomodasi lainnya. Kategori rendah didapatkan dari masyarakat Dusun Krajan yang menilai bahwa Bapak Prayogi sebagai kepala desa terlalu fokus melakukan pembangunan di dusun yang luas lahan pertaniannya dan pada periode kedua ini lebih sering menggunakan tenaga kerja yang ahli pada bidangnya daripada melibatkan masyarakat Desa Ngroto.

### Peran Mobilisator

Peran pemimpin sebagai komunikator atau pengarah masyarakat agar ikut tergerak untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan

pembangunan dan dapat diterima oleh masyarakat dengan baik.

Berdasarkan tabel 3 peran mobilisator mayoritas tingkat sedang sebanyak 20 orang atau 48 persen, diikuti dengan kategori tinggi 18 orang atau 46 persen.

Tabel 3 Persepsi tentang Peran Mobilisator dalam Kepemimpinan Kepala Desa Ngroto

Tingkat Peran Pemimpin	Jumlah (n)	Persentase (%)
Rendah	2	6
Sedang	20	48
Tinggi	18	46
Total	40	100

Hampir semua responden menjawab sesuai sampai sangat sesuai peran mobilisator, hal ini dikarenakan kepala Desa Ngroto, bapak Prayogi dinilai cepat dan transparan mengenai informasi pembangunan desa, baik itu berupa anggaran desa yang terdiri dari pengeluaran dana desa, bantuan untuk masyarakat kurang mampu dan informasi lain yang bersifat arahan dari pemerintah kabupaten ataupun di atasnya. Penyampain arahan kepada masyarakat mudah dimengerti. Tidak menggunakan bahasa yang tinggi dan masyarakat Desa Ngroto kebanyakan tidak paham bahasa Indonesia. Untuk kategori rendah diisi oleh responden yang bekerja di Malang kota, di mana responden tersebut kurang merasakan peran kepala desa secara individu berdasarkan pertanyaan kuisisioner antara lain yaitu transparansi informasi, penggunaan bahasa yang mudah dimengerti tetapi beberapa masyarakat mengaku kurang puas dengan periode kedua Bapak Prayogi, karena kurang melibatkan masyarakat saat di lapang untuk proses 34 pembangunan, bapak Prayogi lebih mengutamakan tenaga ahli.

#### Analisis Partisipasi Masyarakat Desa Ngroto Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan

Program pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengembangan masyarakat berkelanjutan tidak terlepas dari partisipasi yang dimiliki oleh masyarakat dalam program tersebut. Tingkat partisipasi masyarakat diukur dengan menggunakan teori Arnstein (1969) di mana terdapat 8 (delapan) tangga partisipasi dan kewenangan yang dimiliki oleh masyarakat

dalam melaksanakan suatu program di desa. Program yang dilakukan di Desa Ngroto adalah pembangunan infrastruktur jalan. Program ini juga terintegrasi dengan pembangunan desa sehingga menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78 terdapat 3 (tiga) tahapan dalam pembangunan desa, yaitu perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pemantauan. Pengukuran tingkat partisipasi masyarakat dilihat dari keterlibatan dan wewenang yang dimiliki masyarakat dalam ketiga tahapan pembangunan desa tersebut.

#### Manipulasi

Manipulasi merupakan tingkatan partisipasi yang paling rendah, di mana masyarakat hanya dipakai namanya saja. Kegiatan untuk melakukan manipulasi informasi untuk memperoleh dukungan publik dan menjanjikan keadaan yang lebih baik meskipun tidak akan pernah terjadi. Dari tipologi yang diajukan oleh Arnstein dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok besar, yaitu tidak ada partisipasi sama sekali (*non participation*), meliputi: *manipulation* dan *therapy*; partisipasi masyarakat 36 dalam bentuk ini langsung menerima beberapa ketentuan (*degrees of tokenism*), meliputi *informing*, *consultation*, dan *placation*; (3) partisipasi masyarakat dalam bentuk mempunyai kekuasaan (*degrees of citizen power*), meliputi *partnership*, *delegated power*, dan *citizen power*.

Tabel 4 Jumlah dan Persentase Masyarakat Berdasarkan Partisipasi Manipulasi

Tingkat Partisipasi	Jumlah (n)	Persentase (%)
Rendah	0	0
Sedang	40	100
Total	40	100

Tabel 4 merupakan hasil data kuantitatif responden yang diukur berdasarkan tingkat partisipasinya pada tahap manipulasi. Dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi manipulasi masyarakat Desa Ngroto terhadap pembangunan infrastruktur jalan dikategorikan tinggi dengan persentase 100 persen. Hal ini dikarenakan sebagian besar yang berpartisipasi adalah petani dan masyarakat yang ingin mengetahui kegiatan desa, di mana mereka hanya ikut rapat saja tanpa

mengetahui apa manfaat sebelumnya dan bagaimana tidak lanjutnya. Jadi keikutsertaan berdasarkan formalitas saja. Nilai rendah sebesar 0 persen dikarenakan jika ada undangan rapat biasanya disertai bantuan bahan pokok/uang untuk masyarakat, jadi banyak yang hadir

### Terapi

Partisipasi terapi memiliki definisi pemegang kekuasaan memberikan alasan proposal dengan berpura-pura melibatkan masyarakat. Meskipun terlibat dalam kegiatan, tujuannya lebih pada mengubah pola pikir masyarakat daripada mendapatkan masukan dari masyarakat itu sendiri.

Tabel 5 Jumlah dan Persentase Masyarakat Berdasarkan Partisipasi Terapi

Tingkat Partisipasi	Jumlah (n)	Persentase (%)
Rendah	0	0
Sedang	40	100
Total	40	100

Tabel 5 merupakan hasil data kuantitatif responden yang diukur berdasarkan tingkat partisipasinya pada tahap terapi. Dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi terapi masyarakat Desa Ngroto terhadap pembangunan infrastruktur jalan dikategorikan tinggi dengan persentase 100 persen. Walaupun awalnya karena hanya ikut saja karena keterpaksaan tersebut akhirnya masyarakat menjadi paham dari fungsi diadakan pembangunan infrastruktur jalan tersebut. Dari kuesioner terapi yang ditanyakan menghasilkan 0 persen rendah, hal ini menandakan ketertarikan dan keingintahuan masyarakat tinggi.

### Pemberian Informasi

Pemberian informasi memiliki definisi pemegang kekuasaan hanya memberikan informasi kepada masyarakat terkait proposal kegiatan, masyarakat tidak diberdayakan untuk mempengaruhi hasil. Informasi dapat berupa hak, tanggung jawab dan berbagai pilihan, tetapi tidak ada umpan balik atau kekuatan untuk negosiasi dari masyarakat. Informasi diberikan pada tahapan akhir perencanaan dan masyarakat hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mempengaruhi atau berpendapat tentang rencana yang akan disusun.

Tabel 6 Jumlah dan Persentase Masyarakat Berdasarkan Partisipasi Pemberian Informasi

Tingkat Partisipasi	Jumlah (n)	Persentase (%)
Rendah	1	2
Sedang	39	98
Total	40	100

Tabel 6 merupakan hasil data kuantitatif responden yang diukur berdasarkan tingkat partisipasinya pada tahap pemberian informasi. Dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi pemberian informasi masyarakat Desa Ngroto terhadap pembangunan infrastruktur jalan dikategorikan tinggi dengan persentase 98 persen. Hal ini dikarenakan masyarakat sudah mulai mengerti dan tertarik dari manfaat pembangunan infrastruktur jalan, akan tetapi masih belum diperbolehkan mengutarakan pendapat yang diinginkan. Terdapat 1 orang atau 2 persen dari total responden tidak ikut berpartisipasi dikarenakan tidak boleh terlalu banyak berpendapat, sehingga dinilai komunikasinya cenderung satu arah. Biasanya pada tahap ini hanya pemberian informasi mengenai perkembangan pembangunan.

### Konsultasi

Konsultasi memiliki definisi masyarakat tidak hanya diberitahu tetapi juga diundang untuk berbagi pendapat, meskipun tidak ada jaminan bahwa pendapat yang dikemukakan akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Metode yang sering digunakan adalah survei tentang arah pikiran masyarakat atau pertemuan lingkungan masyarakat dan public hearing atau dengar pendapat dengan masyarakat.

Tabel 7 Jumlah dan Persentase Masyarakat Berdasarkan Partisipasi Konsultasi

Tingkat Partisipasi	Jumlah (n)	Persentase (%)
Rendah	2	5
Sedang	38	95
Total	40	100

Tabel 7 merupakan hasil data kuantitatif responden yang diukur berdasarkan tingkat partisipasinya pada tahap konsultasi. Dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi konsultasi masyarakat Desa Ngroto terhadap pembangunan

infrastruktur jalan dikategorikan tinggi dengan persentase 95 persen. Hal ini dikarenakan masyarakat sudah mulai boleh berpendapat mengenai usulan pembangunan infrastruktur jalan, akan tetapi masih belum tentu diterima. Terdapat 2 orang atau 5 persen dari total responden tidak ikut berpartisipasi, karena sudah sering berpendapat tapi tidak terealisasikan.

### Penentrman

Penentrman memiliki definisi usulan masyarakat tetap diperhatikan dan beberapa mulai didengar tetapi kedudukan relatif rendah dan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan anggota dari pemerintah maka tidak mampu mengambil keputusan

Tabel 8 Jumlah dan Persentase Masyarakat Berdasarkan Partisipasi Penentrman

Tingkat Partisipasi	Jumlah (n)	Persentase (%)
Rendah	6	15
Sedang	34	85
Total	40	100

Tabel 8 merupakan hasil data kuantitatif responden yang diukur berdasarkan tingkat partisipasinya pada tahap penentrman. Dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi penentrman masyarakat Desa Ngroto terhadap pembangunan infrastruktur jalan.

### Kemitraan

Kemitraan memiliki definisi masyarakat berhak berunding dengan pengambil keputusan atau pemerintah, atas kesepakatan bersama kekuasaan dibagi antara masyarakat dengan pemerintah. Untuk itu, diambil kesepakatan saling membagi tanggung jawab dalam perencanaan, pengendalian keputusan, penyusunan kebijakan serta pemecahan masalah yang dihadapi.

Tabel 9 Jumlah dan Persentase Masyarakat Berdasarkan Partisipasi Kemitraan

Tingkat Partisipasi	Jumlah (n)	Persentase (%)
Rendah	16	40
Sedang	24	60
Total	40	100

Tabel 9 merupakan hasil data kuantitatif responden yang diukur berdasarkan tingkat

partisipasinya pada tahap kemitraan. Dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi kemitraan masyarakat Desa Ngroto terhadap pembangunan infrastruktur jalan dikategorikan tinggi dengan persentase 60 persen. Hal ini dikarenakan inisiasi sudah mulai datang dari masyarakat tetapi pada perencanaan masih dibantu oleh pemerintah desa untuk mencapai kesepakatan bersama. Artinya 60 persen masyarakat sudah mulai terbuka dan sering untuk diskusi dengan pemerintah desa agar pembangunan sesuai kesepakatan bersama. Terdapat 16 orang atau 40 persen dari total responden tidak ikut berpartisipasi, karena memiliki perbedaan pendapat atau kecewa dengan pihak desa, di beberapa sektor pihak desa dinilai lebih mempercayakan tenaga ahli dalam pembangunan desa.

### Delegasi Kekuasaan

Pada tingkatan ini masyarakat diberi limpahan kewenangan untuk membuat keputusan pada rencana tertentu. Untuk menyelesaikan permasalahan, pemerintah harus mengadakan negosiasi dengan masyarakat tidak dengan tekanan dari atas, dimungkinkan masyarakat mempunyai tingkat kendali atas keputusan pemerintah.

Tabel 10 Jumlah dan Persentase Masyarakat Berdasarkan Delegasi Kekuasaan

Tingkat Partisipasi	Jumlah (n)	Persentase (%)
Rendah	23	58
Sedang	17	42
Total	40	100

Tabel 10 merupakan hasil data kuantitatif responden yang diukur berdasarkan tingkat partisipasinya pada tahap delegasi kekuasaan. Dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi delegasi kekuasaan Desa Ngroto terhadap pembangunan infrastruktur jalan dikategorikan rendah dengan persentase 58 persen. Artinya kewenangan masyarakat dalam membuat keputusan masih rendah. Benar jika semua perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan sudah ada keterlibatan masyarakat, tetapi pemerintah terkadang tiba-tiba menugaskan orang luar desa (tenaga ahli). Jadi 23 orang atau 58 persen dari total responden tidak ikut berpartisipasi, karena

memiliki perbedaan pendapat dengan pihak desa, di beberapa sektor pihak desa dinilai lebih mempercayakan tenaga ahli dalam pembangunan desa.

### Kontrol Masyarakat

Pada tingkatan ini masyarakat dapat partisipasi di dalam dan mengendalikan seluruh proses pengambilan keputusan. Pada tingkatan ini masyarakat memiliki kekuatan untuk mengatur program atau kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingannya. Masyarakat mempunyai wewenang dan dapat mengadakan negosiasi dengan pihak-pihak luar yang hendak melakukan perubahan. Usaha bersama masyarakat ini langsung berhubungan dengan sumber dana untuk memperoleh bantuan tanpa melalui pihak ketiga.

Tabel 11 Jumlah dan Persentase Masyarakat Berdasarkan Kontrol Masyarakat

Tingkat Partisipasi	Jumlah (n)	Persentase (%)
Rendah	28	70
Sedang	12	30
Total	40	100

Tabel 11 merupakan hasil data kuantitatif responden yang diukur berdasarkan tingkat partisipasinya pada tahap kontrol masyarakat. Dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi kontrol masyarakat Desa Ngroto terhadap pembangunan infrastruktur jalan dikategorikan rendah dengan persentase 70 persen dan tinggi 30 persen. Kategori tinggi kebanyakan dijawab oleh responden yang dekat dengan kepala desa dan memiliki keterlibatan tinggi dalam pembangunan. Kategori rendah dikarenakan kontrol masyarakat hanya sebatas perencanaan dan pemeliharaan. Minim sekali berpartisipasi jika masih ada tenaga ahli. Masyarakat hanya membantu hal-hal kecil pembangunan jalan, contohnya hanya sebagai kuli-kuli pembantu saja dengan gaji kecil.

### Analisis Hubungan Peran Pemimpin Motivator dengan Tingkat Partisipasi

Tabel 12 Hasil uji korelasi peran pemimpin dengan tingkat partisipasi

Peran Motivator	Tingkat Partisipasi		
	Rendah	Sedang	Tinggi

Rendah	0.0	23.1	76.9
Sedang	4.0	44.0	52.0
Tinggi	0.0	50.0	50.0

Partisipasi diakibatkan kepala desa berasal dari suku Jawa-Madura dan memiliki hubungan erat dengan pendiri desa (tokoh masyarakat). Sehingga masyarakat merasa tidak enak jika tidak berpartisipasi. Persentase peran motivator sedang, dominan memiliki tingkat partisipasi dengan persentase 52 persen, untuk kategori sedang dan rendah masing-masing memiliki persentase 44 persen dan 4 persen. Menurunnya partisipasi dikarenakan adanya kesibukan dan ketidaksamaan keinginan antara masyarakat dengan pemerintah desa. Selanjutnya untuk peran motivator tinggi, dominan memiliki tingkat partisipasi tinggi yaitu 50 persen dan sedang 50 persen. Artinya peran motivator dalam menggerakkan masyarakat untuk pembangunan masih dipercaya dan dinilai bagus, akan tetapi perlu ditingkatkan terlebih di periode kedua ini yang dinilai menurun dikarenakan kepala desa lebih mempercayakan proyek pembangunan kepada tenaga ahli yang berasal dari luar desa.

### Analisis Hubungan Peran Pemimpin Mobilisator dengan Tingkat Partisipasi

Tabel 13 Hasil uji korelasi peran pemimpin dengan tingkat partisipasi

Peran Fasilitator	Tingkat Partisipasi		
	Rendah	Sedang	Tinggi
Rendah	0.0	16.7	83.3
Sedang	4.3	47.8	47.8
Tinggi	0.0	40.0	60.0

Peran fasilitator yang terdiri dari memberikan fasilitas materil ataupun non materil dinilai belum maksimal. Terbukti dengan persentase kategori tinggi dan sedang memiliki persentase yang sama. Selanjutnya untuk peran fasilitator tinggi, dominan memiliki tingkat partisipasi tinggi yaitu 60 persen, tetapi masih ada 40 persen yang memilih sedang. Artinya peran fasilitator yang ditingkatkan sudah bagus dan mencapai 60 persen, tetapi kurang menyentuh oleh berbagai lapisan masyarakat.

### Analisis Hubungan Peran Pemimpin Mobilisator dengan Tingkat Partisipasi

Tabel 14 Hasil uji korelasi peran pemimpin dengan tingkat partisipasi

Peran	Tingkat Partisipasi		
	Rendah	Sedang	Tinggi
Mobilisator			
Rendah	0.0	66.7	33.3
Sedang	5.0	30.0	65.0
Tinggi	0.0	41.2	58.8

Walaupun mobilisator rendah partisipasi masih relatif sedang dikarenakan masih percayanya masyarakat dengan kepala desa. Dibuktikan dengan terpilihnya kembali pada periode keduanya. Sementara itu untuk persentase peran mobilisator sedang dominan memiliki tingkat partisipasi tinggi dengan persentase 65.0 persen, untuk kategori sedang dan rendah masing-masing memiliki persentase 30.0 persen dan 5.0 persen. Mayoritas tinggi karena pembangunan sudah mulai terlihat hasilnya dan terpilihnya Desa Ngroto ini sebagai desa mandiri terbaik nasional.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Mekarrahayu, Kecamatan Ngroto, Kabupaten Malang, Jawa Timur, dapat disimpulkan bahwa peran pemimpin tidak berhubungan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan. Hal ini dapat disimpulkan dengan penjelasan berikut:

1. Menurut masyarakat Desa Ngroto, peran Bapak Prayogi sebagai kepala desa masih lebih baik saat periode pertama. Dibuktikan dengan prestasi sebagai desa terbaik mandiri nasional pada tahun 2018. Selain itu juga dibuktikan dengan penurunan nilai peran kepala desa yang tergolong sedang sejak periode kedua pada tahun 2019, karena bentuk kekecewaan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desa.
2. Partisipasi masyarakat sampai ke tahap penentrman yang memiliki definisi masyarakat sudah bisa berpendapat dan beberapa pendapatnya sudah mulai didengar, akan tetapi tidak punya kekuatan untuk membuat keputusan. Selain itu partisipasi masyarakat hanya berdasarkan rasa tidak enak (segan) terhadap Bapak Prayogi yang sama-sama memiliki darah suku Jawa-Madura dan masih memiliki keturunan dengan salah satu pendiri atau leluhur Desa Ngroto.
3. Hasil uji korelasi menunjukkan bahwa peran pemimpin yang diukur yakni peran motivator,

peran fasilitator, dan peran mobilisator tidak berhubungan signifikan dengan partisipasi (tidak dapat meningkatkan partisipasi).

## Saran

1. Peran pemimpin kepala Desa Ngroto perlu ditingkatkan melalui kegiatankegiatan yang dapat menumbuhkan kepercayaan dan partisipasi masyarakatnya dalam pelaksanaan pembangunan dengan tidak terlalu dominan melibatkan tenaga ahli untuk proses pembangunan. Terlebih bapak Prayogi masih menjabat pada periode kedua. Sehingga kepercayaan masyarakat masih bisa ditanam kembali melalui penguatan peran tersebut.
2. Partisipasi masyarakat Desa Ngroto jangan hanya berlatar belakang kesamaan suku atau budaya pemimpin. Perlu kesadaran individu masing-masing untuk membangun desa bersama-sama dengan cara memperbanyak kegiatan kerja bakti. Sehingga partisipasi masyarakat tidak lagi tergantung oleh pemimpin.
3. Diperlukan rapat evaluasi rutin dengan masyarakat terkait kinerja kepemimpinan Bapak Prayogi sebagai kepala desa agar dapat terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim. 2005. Analisis Investasi. Edisi Kedua. Jakarta : Salemba Empat.
- Adisasmata, Raharjo. 2006. Membangun Desa Partisipatif. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Akbar, M. F., Suprpto, S., & Surati, S. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Jatimulya Kabupaten Boalemo. Publik (Jurnal Ilmu Administrasi), 6(2), 135-142.
- Ariyani I. 2007. Penguatan partisipasi masyarakat dalam program imbal swadaya di desa curug kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor. [Tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Arnstein SR. 1969. A ladder of citizen participation, JAIP, 35(4), July 1969, pp. 216- 224.
- Bimo Walgito. 2002. Pengantar Psikologi Umum. Yogyakarta (ID): Andi Offset.
- Barlan ZA. 2011. Pengaruh Pemimpin Lokal terhadap Keberhasilan Program

- Pembangunan. [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- BPS Badan Pusat Statistik. 2014. Data Desa Tertinggal.
- BPS Badan Pusat Statistik. 2015. Indikator Kesejahteraan Rakyat.
- BPS Badan Pusat Statistik. 2018. Data Desa Tertinggal.
- Buku Pedoman Pelaksanaan Program PPIP Tahun 2012. Chandra, Eka dkk. 2003. Membangun Forum Warga “Implementasi Partisipasi dan Penguatan Masyarakat Sipil”. Bandung (ID): Yayasan AKATIGA
- Darmaputera, E. 2004. Pemimpin Formal Pemimpin Informal. Jakarta (ID): Harian Fadlurrahman I dan Saharuddin. Hubungan (ID): Pustaka Pelajar. Lestari, Hesti. 1991. Peranan Kepala Desa Sebagai Penggerak Peranserta Anggota Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik Desa. (Di Desa Kumpulrejo Dan Malakerto, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Dati II Kendal, Propinsi Jawa Tengah) [Tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Liow RM. 2015. Peran pemimpin informal dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Malola. *Jurnal Adm Publik*. 3(31):1-9.
- Mahayana W. 2013. Peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 1(1): 400-414.
- Mubyarto, et al. 1997. Gerakan Nasional Penanggulangan Kemiskinan: Kajian Bersama Pengembangan Kebijaksanaan. Yogyakarta (ID): Aditya Media.
- Muryusna. 2014. Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Program Pemberdayaan Desa Menuju Desa Mandiri (Studi Kasus di Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu) Kabupaten Indragiri Hilir. Malang (ID): Jurnal Brawijaya Press. 1 (2)
- Nasdian FT. 2014. Pengembangan Masyarakat. Jakarta (ID): Yayasan Pustaka Obor Indonesia Edisi 1. Nurmalasari V, M Syaikh Rohman. 2010. Peranan Kepemimpinan dalam Pembangunan Daerah (Studi Kasus Gorontalo). Lampung (ID): Universitas Airlangga.
- Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 tentang Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur. Prasetyo RB, Firdaus M. 2009. Pengaruh infrastruktur pada pertumbuhan ekonomi wilayah di Indonesia. *Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*. Bogor (ID): Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan.
- Prasetyo, P. Eko. 2008. *Fundamental Makro Ekonomi*. Yogyakarta (ID): Beta Offset.
- Rostiyati A. 2012. Peranan pemimpin informal pada masyarakat Guradog. Bandung (ID): Jurnal Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Bandung.
- Saerofi, Mujib. 2005. Analisis Pertumbuhan Dan Perkembangan Ekonomi Sektor Potensial Semarang. [Skripsi]. Semarang (ID): Fakultas Ekonomi Unnes.
- Sari P. 2011. Analisis pengaruh infrastruktur ekonomi dan sosial terhadap produktifitas ekonomi di Indonesia. [Tesis]. Bogor [ID]: Institut Pertanian Bogor.
- Singarimbun M. 2012. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES
- Sedarmayanti. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. PT. Bandung (ID): Refika Aditama
- Septiana J. 2013. *Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Kelahiran di Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak*. [Skripsi]. Banten (ID): FISIP Universitas Sultan Ageng Titayasa Serang Banten.
- Sianipar, J.P. 1998. *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta (ID): Lembaga Administras Negara.
- Sibarani, M.H.M. 2002. *Kontribusi Infrastruktur terhadap Pertumbuhan. Ekonomi Indonesia*. {Tesis}. Jakarta (ID): Magister Sains. Progrsm Pascasarjana Universitas Indonesia
- Soekanto S, 1987. *Sosiologi: Suatu Pengantar* Jakarta (ID): Rajawali Press Sukimo, Sadono 1985. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta(ID): Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan Bina Grafika. *Jurnal Ekonomi Teraik Kogoya, Benu Olfie, Esry Laoh*. (2015). *Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalana Desa di Kabupaten Lanny Jaya*

- Papua. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 15 (2).
- Urpon, Resa 2015. Hubungan Peran Pemimpin Lokal dengan Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan Program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Dramaga. {Skripsi}. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Undang-undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.
- Widodo. 2011. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Pengentasan eiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Jawa Tengah. Kalimantan Barat (ID): Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan Vol. 1 No.1 Hal 25-42.